

PERAN PEMUDA DALAM MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Irene Felicia Xaviera¹, Rosa Erlinda Sibarani², Sylviona Meiriska³, Shaiba Nanda Febiola⁴, Jeims Hiskia Karo Sekali⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Correspondence

Email: rosaerlindasibarani@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 25 November 2024

Accepted: 3 Desember 2024

Published: 4 Desember 2024

Abstrak

Pemuda, khususnya mahasiswa, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel ini mengkaji kontribusi pemuda melalui berbagai pendekatan, seperti keterlibatan dalam organisasi kampus, kolaborasi dengan komunitas pemuda, dan pemanfaatan teknologi digital dalam advokasi HAM. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi, pemuda dapat mendorong budaya penghormatan terhadap HAM yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Artikel ini memberikan analisis teoretis dan praktis tentang strategi yang dapat dilakukan pemuda untuk memperkuat HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Pemuda, Hak Asasi Manusia, advokasi, organisasi kampus, teknologi digital

Abstract

Youth, particularly university students, have significant potential as agents of change in advancing Human Rights (HR) in Indonesia. This article examines youth contributions through various approaches, such as involvement in campus organizations, collaboration with youth communities, and using digital technology in HR advocacy. By addressing their challenges, youth can foster a culture of respect for HR more systematically and sustainably. This article provides theoretical and practical analyses of strategies that youth can implement to strengthen HR in Indonesia.

Keywords: Youth, Human Rights, advocacy, campus organizations, digital technology

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, kebangsaan, maupun status sosial. HAM mencerminkan nilai-nilai universal yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, HAM tidak hanya diatur dalam konstitusi melalui Pasal 28 UUD 1945, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai kebijakan dan undang-undang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih menjadi isu yang signifikan dan kompleks. Pelanggaran HAM di Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi berbasis gender, agama, dan etnis hingga pelanggaran kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, individu yang mencoba memperjuangkan haknya justru menghadapi ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya advokasi HAM yang kuat dan berkelanjutan (Rohman, 2022).

Dalam upaya memajukan HAM, pemuda, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang dapat menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. Dengan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan jaringan sosial yang luas, pemuda mampu membawa perubahan yang signifikan di tengah masyarakat. Pemuda juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam advokasi HAM. Mahasiswa, misalnya, sering kali menjadi pelopor dalam menyuarakan

keadilan dan hak-hak dasar manusia melalui aksi demonstrasi, seminar, atau kegiatan kampus lainnya. Selain itu, keberadaan organisasi kampus dan komunitas pemuda memberikan ruang bagi mereka untuk memperkuat gerakan sosial yang berorientasi pada HAM (Qudsyah, 2023)¹.

Sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia telah memainkan peran penting dalam berbagai gerakan perubahan sosial dan politik, termasuk perjuangan kemerdekaan, reformasi, dan demokratisasi. Pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa pemuda memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah pembangunan bangsa, termasuk dalam memperjuangkan HAM. Namun, dalam memperjuangkan HAM, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya pemahaman tentang HAM, resistensi dari pihak-pihak tertentu, serta kurangnya dukungan dari sistem hukum yang ada. Tantangan ini memerlukan strategi yang efektif agar pemuda dapat terus berkontribusi secara optimal dalam memperjuangkan HAM (Rafidatul Aisy et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu alat yang sangat relevan di era modern ini. Media sosial, situs web, dan aplikasi daring memberikan peluang besar bagi pemuda untuk mengadvokasi HAM secara lebih luas dan efektif. Kampanye digital, misalnya, memungkinkan isu-isu HAM untuk diangkat ke tingkat global, menciptakan tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Selain teknologi, keterlibatan pemuda dalam pendidikan HAM juga merupakan langkah penting. Edukasi tentang HAM tidak hanya membantu pemuda memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Proses ini dapat dimulai dari lingkungan kampus hingga komunitas lokal di sekitar mereka (Trisnadiwan, 2024)².

Kolaborasi antara pemuda dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM juga menjadi kunci keberhasilan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Kemitraan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional dapat memperkuat kapasitas pemuda dalam melakukan advokasi dan menekan pelanggaran HAM. Di sisi lain, penting bagi pemuda untuk memahami kerangka hukum yang melindungi HAM di Indonesia. Pemahaman ini tidak hanya membantu mereka dalam melakukan advokasi, tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan sejalan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat memberikan dampak yang lebih besar (Ali Akrom & Nugraha, 2024).

Tidak dapat dipungkiri bahwa advokasi HAM memerlukan keberanian dan komitmen yang tinggi. Pemuda yang terlibat dalam gerakan HAM sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, dan bahkan kriminalisasi. Namun, dengan solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan ini dapat diatasi. Budaya penghormatan terhadap HAM harus terus dikembangkan di Indonesia. Pemuda dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menciptakan ruang diskusi yang inklusif, menyuarakan isu-isu HAM yang kurang terangkat, dan membangun kesadaran di masyarakat. Langkah-langkah ini memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

¹ Qudsyah, A. L. "Kebebasan mahasiswa dalam berpendapat dari prespektif ham," *3(3)* (2023): 3035–3049, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.366>.

² Trisnadiwan, R. "Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *3(1)* (2024): 15–26, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>.

Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini di lingkungan pendidikan. Kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM akan membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan. Pemuda yang memahami nilai-nilai ini akan lebih siap untuk berkontribusi dalam memperjuangkan HAM di masa depan. Dalam konteks global, pemuda Indonesia juga memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam gerakan HAM internasional. Melalui forum-forum internasional, pemuda dapat belajar dari pengalaman negara lain, berbagi praktik terbaik, dan membangun jaringan yang lebih luas untuk memperkuat gerakan HAM di Indonesia (Arifin & Lestari, 2019)³.

Namun, keberhasilan advokasi HAM juga bergantung pada dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah, misalnya, harus menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan HAM, sementara masyarakat harus membuka ruang untuk dialog dan keterlibatan pemuda dalam isu-isu HAM. Artikel ini akan membahas secara mendalam peran pemuda dalam memajukan HAM di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis teoretis dan praktis tentang bagaimana pemuda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperjuangkan HAM. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, pemuda dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Upaya ini memerlukan kerja sama, inovasi, dan komitmen dari berbagai pihak agar cita-cita penghormatan terhadap HAM dapat tercapai di Indonesia (Arifin & Lestari, 2019).

KAJIAN TEORI

1. Definisi dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sebagai manusia, terlepas dari latar belakang ras, agama, gender, atau status sosial. Hak ini melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut, karena merupakan bagian dari esensi manusia itu sendiri. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menetapkan kerangka dasar bagi pemahaman dan implementasi HAM secara global. Prinsip utama HAM adalah non-diskriminasi, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar. Dalam praktiknya, non-diskriminasi menjadi fondasi bagi upaya mengatasi ketidakadilan struktural yang sering kali dialami oleh kelompok minoritas, perempuan, dan individu dengan disabilitas (Raja Oloan, 2023)⁴.

Selain non-diskriminasi, prinsip kesetaraan menjadi elemen penting dalam HAM. Kesetaraan berarti memberikan hak yang sama kepada setiap individu untuk menikmati kebebasan, peluang, dan sumber daya yang tersedia. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, atau politik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia juga menjadi inti dari HAM. Setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati oleh orang lain dan negara. Penghormatan ini mencakup

³ Arifin, R., & Lestari, L. E. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2) (2019): 12, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.

⁴ Raja Oloan. "Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Ham) Bagi," *1(4)* (2023): 1561–1567.

perlakuan yang adil, bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghinaan yang merendahkan martabat seseorang. Prinsip ini mendasari berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) (Pertiwi & Hidayah, 2021).

HAM bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, dan saling terkait. Universalisme berarti bahwa hak-hak ini berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa kecuali. Sifat ini memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari perlindungan HAM, baik di bawah hukum internasional maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J yang mengatur hak-hak dasar warga negara. HAM juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, hak atas pendidikan memengaruhi kemampuan seseorang untuk menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pekerjaan yang layak atau hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, yang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam melindungi HAM (Priatiningsih, 2023)⁵.

HAM bersifat tidak dapat dicabut (inalienable), yang berarti hak-hak ini tidak dapat dihilangkan atau ditanggihkan, bahkan oleh negara sekalipun. Namun, dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat yang diakui secara hukum, beberapa hak dapat dibatasi dengan syarat bahwa pembatasan tersebut bersifat sementara, proporsional, dan tidak diskriminatif. Misalnya, hak atas kebebasan bergerak dapat dibatasi selama pandemi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip HAM juga menuntut adanya akuntabilitas. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu menikmati hak-hak mereka sepenuhnya. Ini mencakup kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran HAM, menghukum pelanggar, dan memberikan pemulihan kepada korban. Prinsip ini diperkuat melalui mekanisme internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan pengadilan HAM regional (Adila et al., 2024).

Dalam praktiknya, HAM juga mengharuskan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Individu, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diterapkan. Partisipasi ini meliputi advokasi, pendidikan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, HAM adalah pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan bagi upaya global dan lokal untuk melindungi hak-hak individu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang definisi dan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat berkontribusi lebih baik dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di setiap level kehidupan (Priatiningsih, 2023)⁶.

2. Pemuda sebagai Agen Perubahan

⁵ Priatiningsih, H. "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09) (2023): 752–769, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.

⁶ Priatiningsih, H. "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09) (2023): 752–769, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.

Teori perubahan sosial menekankan bahwa pemuda memainkan peran vital dalam menciptakan transformasi di masyarakat. Smith (2018) mengungkapkan bahwa pemuda memiliki karakteristik inovatif dan progresif yang membuat mereka ideal sebagai pelopor gerakan sosial, termasuk dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemuda sering kali memiliki semangat yang tinggi, pemikiran kritis, dan keberanian untuk menantang status quo. Hal ini menjadikan mereka aktor yang mampu memobilisasi perubahan yang signifikan. Dalam sejarah, peran pemuda sebagai agen perubahan telah terbukti di berbagai belahan dunia. Gerakan civil rights di Amerika Serikat, misalnya, banyak digerakkan oleh pemuda yang berjuang melawan diskriminasi rasial. Di Indonesia, peran pemuda terlihat jelas dalam momentum Sumpah Pemuda 1928, Reformasi 1998, hingga keterlibatan mereka dalam isu-isu kontemporer seperti lingkungan dan HAM. Sejarah ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki kapasitas untuk menjadi katalis perubahan sosial yang berkelanjutan (Alvin Hamidah et al., 2023).

Pemuda juga memiliki akses yang luas terhadap pendidikan dan teknologi, yang menjadi modal utama dalam advokasi sosial. Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu HAM, sementara teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan efisien. Melalui media sosial, pemuda dapat menyuarakan ketidakadilan, memobilisasi massa, dan mendesak pemerintah untuk bertindak. Teknologi ini juga memungkinkan kolaborasi lintas wilayah, memperkuat jaringan gerakan sosial. Karakteristik khas pemuda lainnya adalah kreativitas dan adaptabilitas. Dalam memperjuangkan HAM, pemuda sering kali menggunakan pendekatan inovatif yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Misalnya, kampanye HAM berbasis seni atau penggunaan platform digital untuk pendidikan HAM. Pendekatan ini mampu menarik perhatian khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda lainnya, sehingga menciptakan efek domino dalam memperkuat kesadaran HAM di masyarakat (Rohman, 2022)⁷.

Namun, menjadi agen perubahan bukan tanpa tantangan. Pemuda sering kali dihadapkan pada resistensi dari pihak yang memiliki kepentingan dengan status quo. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pengalaman juga menjadi kendala yang harus diatasi. Meskipun demikian, tantangan ini sering kali justru memotivasi pemuda untuk lebih gigih dalam perjuangan mereka, menjadikan mereka aktor yang tangguh dalam menghadapi rintangan sosial. Organisasi pemuda, baik yang berbasis kampus maupun komunitas, memiliki peran penting dalam memfasilitasi peran pemuda sebagai agen perubahan. Organisasi ini menjadi wadah untuk berdiskusi, merumuskan strategi, dan melaksanakan aksi kolektif. Contoh nyata adalah organisasi mahasiswa yang mengadvokasi isu HAM melalui seminar, pelatihan, dan aksi langsung seperti demonstrasi damai. Kolaborasi dengan organisasi lain juga memperkuat posisi mereka dalam mendorong perubahan (Qudsyah, 2023).

Selain organisasi formal, pemuda juga dapat berperan secara individu dalam menciptakan perubahan sosial. Kesadaran individu terhadap pentingnya HAM dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan kecil, seperti menyuarakan pendapat di media sosial, mengedukasi lingkungan sekitar, atau berpartisipasi dalam kampanye sosial. Dengan jumlah pemuda yang besar, tindakan individu ini dapat terakumulasi menjadi gerakan kolektif yang signifikan. Konteks lokal juga memberikan peluang bagi pemuda untuk bertindak sebagai agen perubahan. Di Indonesia, pemuda dapat berfokus pada isu-isu HAM yang relevan dengan kondisi masyarakat, seperti perlindungan pekerja anak, kesetaraan gender, atau hak

⁷ Rohman, A. "Implementasi Hak Partisipasi Pemuda dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)," *Res Nullinus*, 5(1) (2022): 22–34, <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.

masyarakat adat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, pemuda dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berdampak langsung pada komunitas mereka (Rafidatul Aisy et al., 2022)⁸.

Peran pemuda dalam perubahan sosial juga didukung oleh prinsip inklusivitas. Pemuda dari berbagai latar belakang dapat bersatu dalam memperjuangkan HAM, menciptakan solidaritas lintas budaya, agama, dan etnis. Hal ini tidak hanya memperkuat gerakan sosial tetapi juga membangun toleransi dan keadilan sosial yang lebih baik. Inklusivitas ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks. Pemuda memiliki peran yang strategis sebagai agen perubahan, khususnya dalam advokasi HAM. Dengan memanfaatkan karakteristik inovatif, pendidikan, teknologi, dan kolaborasi, mereka dapat mendorong perubahan sosial yang signifikan. Meskipun menghadapi tantangan, semangat dan daya juang pemuda menjadikan mereka aset penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghormati HAM. Peran ini harus terus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas (Trisnadiwan, 2024).

3. Advokasi dan Peran Teknologi Digital

Advokasi adalah proses sistematis untuk memengaruhi kebijakan publik dan sosial melalui aktivitas yang terorganisir. Advokasi sering kali dilakukan untuk menyuarakan isu-isu penting yang memerlukan perhatian, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ketidakadilan sosial, atau diskriminasi. Dalam konteks ini, teknologi digital telah menjadi alat yang sangat efektif dalam memperkuat gerakan advokasi, karena mampu meningkatkan aksesibilitas informasi dan jangkauan kampanye secara signifikan. Salah satu kontribusi utama teknologi digital dalam advokasi adalah kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Platform seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan instan memungkinkan para aktivis untuk menjangkau audiens yang lebih besar dalam waktu singkat. Selain itu, teknologi digital menyediakan ruang partisipasi yang inklusif. Berbeda dengan advokasi tradisional yang sering kali membutuhkan sumber daya besar untuk mengadakan acara fisik, kampanye digital dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Hal ini memungkinkan keterlibatan lebih banyak individu, terutama dari kelompok marjinal yang mungkin tidak memiliki akses ke platform advokasi konvensional (Ali Akrom & Nugraha, 2024)⁹.

Pemuda, yang dikenal sebagai generasi digital native, memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk advokasi HAM. Dengan kemampuan mereka dalam menggunakan media sosial dan alat digital lainnya, pemuda dapat menjadi penggerak utama dalam kampanye digital. Misalnya, mahasiswa dapat membuat konten edukasi tentang HAM, menyelenggarakan webinar, atau mengorganisasi petisi daring untuk mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan yang tidak adil. Namun, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pendidikan. Melalui teknologi, materi-materi tentang HAM dapat disampaikan dalam format yang menarik, seperti video animasi, infografis, atau podcast. Konten ini tidak hanya mengedukasi masyarakat umum, tetapi juga

⁸ Rafidatul Aisy, D., Abdillah, Amalia, & Santoso, G. "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Jiwa Kebangsaan Bagi Generasi Muda Milenial," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01(03) (2022): 164–172.

⁹ Ali Akrom, A. E. S. S., & Nugraha, Y. "Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa," *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1) (2024): 253–258, <https://doi.org/10.36805/civics.v7i1.2927>.

membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu HAM di kalangan generasi muda (Arifin & Lestari, 2019).

Teknologi digital juga memungkinkan pengumpulan data dan pemantauan pelanggaran HAM secara real-time. Aplikasi seperti "Ushahidi" digunakan untuk melaporkan pelanggaran HAM di berbagai lokasi, memberikan informasi langsung kepada organisasi HAM atau pemerintah untuk mengambil tindakan. Dengan teknologi ini, advokasi tidak lagi hanya reaktif, tetapi juga dapat bersifat proaktif dengan menyediakan data yang mendukung pembuatan kebijakan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi digital dalam advokasi juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mengaburkan tujuan kampanye. Selain itu, risiko keamanan siber seperti peretasan dan pengawasan digital oleh pihak yang berkepentingan juga menjadi ancaman bagi aktivis HAM. Oleh karena itu, literasi digital menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh para aktivis dan organisasi advokasi (Raja Oloan, 2023)¹⁰.

Peran teknologi digital dalam advokasi juga memerlukan strategi yang terencana. Kampanye yang efektif tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pesan yang jelas, narasi yang kuat, dan target audiens yang tepat. Dengan kombinasi ini, advokasi digital dapat menciptakan dampak yang lebih besar, baik dalam mengubah opini publik maupun dalam mendorong tindakan konkret dari pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemuda, organisasi HAM, dan pemerintah juga dapat diperkuat melalui teknologi digital. Misalnya, platform daring dapat digunakan untuk mengadakan dialog interaktif, menggalang dana untuk kampanye, atau membangun jaringan solidaritas global. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat kolaborasi, upaya advokasi dapat menjadi lebih terorganisir dan efektif dalam mencapai tujuannya. Secara keseluruhan, teknologi digital telah membuka peluang baru bagi advokasi HAM, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Meskipun terdapat tantangan, potensi teknologi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat dampak advokasi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemuda perlu terus mengeksplorasi dan mengembangkan penggunaan teknologi dalam advokasi untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan (Pertiwi & Hidayah, 2021)¹¹.

METODE

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran pemuda dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada kontribusi mereka melalui berbagai media dan pendekatan, termasuk organisasi kampus, komunitas pemuda, serta pemanfaatan teknologi digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengkaji berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku-buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yang berkaitan dengan isu-isu HAM dan dinamika peran pemuda dalam gerakan sosial. Sumber-sumber ini dipilih secara cermat untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang terkait dengan advokasi HAM, serta peran pemuda sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, penelitian ini juga meninjau literatur yang membahas tentang tantangan yang dihadapi

¹⁰ Raja Oloan. "Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Ham) Bagi," *1(4)* (2023): 1561–1567.

¹¹ Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar," *Jurnal Kewarganegaraan*, *5(2)* (2021): 376–380,

<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1717>.

pemuda dalam menjalankan peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hambatan sosial, politik, dan hukum yang dapat menghambat efektivitas gerakan mereka. Proses analisis dilakukan dengan cara menilai dan menginterpretasi informasi dari sumber-sumber tersebut untuk menemukan pola, tren, dan temuan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penulis untuk memahami secara lebih mendalam makna dan konteks yang terkandung dalam setiap sumber yang dikaji, serta untuk menyusun pemahaman yang lebih holistik tentang kontribusi pemuda dalam memajukan dan melindungi HAM. Selain itu, analisis deskriptif memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara rinci berbagai perspektif yang ada dalam literatur dan merumuskan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemuda dan organisasi terkait dalam memperkuat peran mereka dalam advokasi HAM. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi pemuda, serta strategi yang dapat mereka gunakan untuk memperkuat gerakan HAM di Indonesia (Adila et al., 2024)¹².

PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pemuda dalam Advokasi HAM

Organisasi Kampus

Organisasi kampus memiliki peran penting sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan bertindak dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu pilar pendidikan, kampus sering menjadi tempat lahirnya pemikiran-pemikiran kritis terkait isu-isu sosial, termasuk HAM. Melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM), pemuda dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung penyebaran pengetahuan tentang HAM. Misalnya, seminar tematik dapat menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, aktivis HAM, atau korban pelanggaran HAM untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada peserta. Selain seminar, diskusi rutin menjadi salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh organisasi kampus. Diskusi ini memungkinkan mahasiswa untuk mendalami topik-topik spesifik, seperti diskriminasi, hak atas pendidikan, atau hak-hak kelompok rentan. Melalui forum ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan berargumen secara konstruktif (Rohman, 2022).

Pelatihan atau workshop terkait HAM juga dapat diselenggarakan oleh organisasi kampus. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada mahasiswa, seperti kemampuan menyusun kampanye advokasi, teknik komunikasi publik, atau cara mengidentifikasi pelanggaran HAM di masyarakat. Dengan bekal keterampilan ini, mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengambil peran aktif sebagai advokat HAM. Selain itu, kampus juga dapat menjadi tempat untuk menginisiasi program-program advokasi berbasis penelitian. Melalui kerja sama antara mahasiswa dan dosen, organisasi kampus dapat menghasilkan kajian akademis yang memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan terkait isu-isu HAM. Hasil kajian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal, artikel, atau presentasi di forum nasional maupun internasional (Qudsya, 2023).

¹² Adila, N., Auliya, S., Tasya, P., Niko, S., & Muhammad, H. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Kalangan Remaja," *3(2)* (2024): 1433–1438.

Organisasi kampus juga dapat membangun jejaring dengan komunitas luar untuk memperluas dampak advokasi. Misalnya, mahasiswa dapat berkolaborasi dengan NGO atau lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan bersama. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa tetapi juga meningkatkan legitimasi gerakan advokasi yang mereka jalankan. Tidak hanya fokus pada aksi, organisasi kampus juga dapat menjadi tempat untuk memperingati hari-hari penting terkait HAM, seperti Hari HAM Internasional atau Hari Anti Diskriminasi Rasial. Perayaan ini dapat diisi dengan pameran, pagelaran seni, atau kampanye media sosial yang menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati HAM (Rafidatul Aisy et al., 2022)¹³.

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kampus juga dapat menggunakan teknologi digital untuk mendukung kegiatan mereka. Media sosial, misalnya, dapat menjadi platform untuk mempromosikan acara atau menyebarkan informasi terkait HAM. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat menjangkau audiens yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus tidak hanya memberikan manfaat bagi advokasi HAM tetapi juga bagi pengembangan diri mereka. Melalui aktivitas ini, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja tim, yang semuanya merupakan keterampilan penting untuk masa depan mereka. Meskipun banyak peluang, keterlibatan dalam organisasi kampus juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Namun, dengan manajemen yang baik dan dukungan dari pihak kampus, tantangan ini dapat diatasi. Dengan begitu, organisasi kampus tetap dapat menjadi pusat advokasi HAM yang efektif (Trisnadiwan, 2024)¹⁴.

Komunitas Pemuda

Selain organisasi kampus, kolaborasi dengan komunitas pemuda di luar lingkungan akademik menjadi langkah strategis dalam memperkuat advokasi HAM. Komunitas pemuda sering kali memiliki struktur yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih kreatif dalam menyuarakan isu-isu sosial. Kolaborasi ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar dari pengalaman praktis dan berkontribusi secara langsung dalam aksi-aksi lapangan. Salah satu bentuk kolaborasi adalah bergabung dalam komunitas lokal yang fokus pada isu-isu tertentu, seperti hak anak, hak perempuan, atau hak kelompok disabilitas. Melalui komunitas ini, pemuda dapat berpartisipasi dalam program-program yang berdampak langsung, seperti penyuluhan hukum, kampanye kesadaran, atau penggalangan dana untuk korban pelanggaran HAM (Ali Akrom & Nugraha, 2024).

Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) juga dapat memperluas cakupan advokasi HAM oleh pemuda. NGO biasanya memiliki jaringan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek besar yang memberikan dampak signifikan.

¹³ Rafidatul Aisy, D., Abdillah, Amalia, & Santoso, G. "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Jiwa Kebangsaan Bagi Generasi Muda Milenial," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01(03) (2022): 164–172.

¹⁴ Trisnadiwan, R. "Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1) (2024): 15–26, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>.

Misalnya, mahasiswa dapat membantu dalam penelitian, menyusun laporan, atau mengorganisir kampanye bersama NGO yang berfokus pada HAM. Komunitas pemuda juga sering menginisiasi gerakan berbasis seni dan budaya untuk mendukung advokasi HAM. Misalnya, festival seni yang menampilkan karya-karya bertema HAM dapat menjadi medium untuk menyampaikan pesan secara kreatif. Kegiatan ini tidak hanya mengedukasi masyarakat tetapi juga menciptakan suasana yang inklusif dan mendukung dialog terbuka (Arifin & Lestari, 2019).

Selain itu, komunitas pemuda juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung advokasi mereka. Dengan memanfaatkan media sosial, situs web, atau aplikasi khusus, komunitas ini dapat menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye HAM. Teknologi digital memungkinkan komunitas pemuda untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis. Kolaborasi dengan komunitas pemuda juga memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan jaringan profesional. Melalui interaksi dengan aktivis, akademisi, atau pemangku kebijakan, mahasiswa dapat membangun koneksi yang bermanfaat untuk karier mereka di masa depan, terutama jika mereka tertarik bekerja di bidang HAM atau pembangunan sosial (Raja Oloan, 2023)¹⁵.

Selain memberikan manfaat praktis, keterlibatan dalam komunitas pemuda juga memperkuat solidaritas di antara generasi muda. Solidaritas ini penting untuk menciptakan gerakan advokasi yang kohesif dan berkelanjutan. Dengan saling mendukung, komunitas pemuda dapat mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi dengan komunitas pemuda sering kali melibatkan perbedaan visi atau pendekatan. Namun, dengan komunikasi yang baik dan komitmen untuk tujuan bersama, tantangan ini dapat diatasi. Sinergi antara berbagai komunitas pemuda dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam advokasi HAM. Dengan berkolaborasi, mahasiswa dan komunitas pemuda dapat mengintegrasikan pengetahuan teoretis dari kampus dengan pengalaman praktis di lapangan. Kombinasi ini akan menghasilkan advokasi HAM yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara mahasiswa dan komunitas pemuda perlu terus didorong sebagai strategi utama dalam memajukan HAM di Indonesia (Pertiwi & Hidayah, 2021)¹⁶.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kampanye HAM

Teknologi digital telah membuka peluang baru dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM). Platform seperti media sosial, situs web, dan aplikasi daring memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye berbasis teknologi digital telah membuktikan kemampuannya untuk menciptakan perubahan sosial. Sebagai contoh, kampanye melawan diskriminasi berbasis gender dan agama sering menggunakan tagar (hashtag) di media sosial untuk menyuarakan isu dan membangun solidaritas global. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi alat utama dalam

¹⁵ Raja Oloan. "Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Ham) Bagi," *1(4)* (2023): 1561–1567.

¹⁶ Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar," *Jurnal Kewarganegaraan*, *5(2)* (2021): 376–380,

<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1717>.

kampanye HAM. Pemuda dapat menggunakan platform ini untuk berbagi cerita, infografis, dan video yang mendidik masyarakat tentang pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah. Konten visual seperti infografis sangat efektif karena menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, video singkat di TikTok atau Reels Instagram dapat menyampaikan pesan yang kuat dan memotivasi audiens untuk bertindak (Adila et al., 2024).

Aplikasi mobile juga menjadi inovasi yang membantu kampanye HAM. Beberapa aplikasi dirancang khusus untuk membantu korban pelanggaran HAM, seperti aplikasi pengaduan atau pelaporan pelanggaran secara anonim. Di sisi lain, aplikasi seperti Telegram dan Signal digunakan oleh aktivis HAM untuk berkomunikasi dengan aman, menghindari risiko pemantauan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kampanye berbasis teknologi digital juga memungkinkan kolaborasi lintas batas. Pemuda dari berbagai negara dapat terhubung untuk berbagi strategi, sumber daya, atau informasi terkait HAM. Dengan teknologi ini, kampanye HAM dapat bersifat global dan lebih efektif dalam menekan pelanggaran di berbagai wilayah dunia. Kolaborasi internasional ini memperkuat pesan bahwa HAM adalah nilai universal yang harus dijunjung tinggi (Priatiningsih, 2023)¹⁷.

Namun, pemanfaatan teknologi digital dalam kampanye HAM juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Ketika informasi yang tidak akurat tersebar, kredibilitas kampanye dapat menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memastikan validitas informasi sebelum membagikannya. Memverifikasi fakta dari sumber yang terpercaya adalah langkah kunci dalam menjaga integritas kampanye. Tantangan lain adalah risiko keamanan digital. Aktivis yang terlibat dalam kampanye HAM sering menghadapi ancaman, seperti peretasan atau pengawasan digital oleh pihak tertentu. Dalam menghadapi ancaman ini, pemuda perlu menggunakan alat keamanan digital, seperti enkripsi pesan dan autentikasi dua faktor, untuk melindungi data mereka. Pendidikan tentang keamanan digital menjadi aspek penting dalam kampanye HAM berbasis teknologi (Alvin Hamidah et al., 2023).

3. Tantangan dan Solusi dalam Advokasi HAM

Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemuda menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas perjuangan mereka. Tantangan ini sering kali berasal dari kurangnya pengetahuan tentang HAM, resistensi sosial terhadap perubahan, dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, solusi-solusi yang efektif dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut, agar pemuda tetap dapat berkontribusi secara optimal dalam memajukan HAM. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Tantangan 1: Kurangnya Pengetahuan tentang HAM

Pengetahuan yang kurang tentang hak asasi manusia sering menjadi hambatan utama bagi pemuda untuk terlibat dalam advokasi HAM. Banyak pemuda yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan bagaimana hal tersebut

¹⁷ Priatiningsih, H. "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09) (2023): 752–769, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.

berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal mengenai HAM di sekolah atau universitas, atau tidak adanya program yang memperkenalkan pemuda pada pentingnya isu ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Solusi 1: Edukasi HAM Secara Berkelanjutan

Edukasi yang berkelanjutan mengenai HAM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan diskusi tentang HAM, baik di tingkat kampus maupun komunitas. Pemuda perlu dilibatkan dalam kegiatan yang mendorong pemahaman mendalam mengenai hak-hak mereka dan cara untuk memperjuangkannya. Penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan HAM dalam kehidupan sosial-politik dapat dilaksanakan melalui berbagai format, mulai dari program pendidikan formal hingga kampanye sosial di media sosial. Melalui proses edukasi yang berkelanjutan, pemuda diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak asasi mereka dan cara untuk menegakkannya (Qudsyah, 2023)¹⁸.

Tantangan 2: Resistensi Sosial terhadap Perubahan

Perubahan sosial sering kali mendapatkan resistensi, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa terancam dengan perubahan tersebut. Dalam konteks advokasi HAM, resistensi sosial ini bisa datang dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu, penolakan terhadap hak-hak minoritas, atau bahkan pengaruh politik yang menghalangi reformasi HAM. Pemuda yang terlibat dalam advokasi HAM sering kali menghadapi stigma atau perlawanan dari masyarakat yang konservatif, yang merasa bahwa pergerakan ini dapat mengguncang nilai-nilai tradisional atau agama mereka.

Solusi 2: Penguatan Jaringan dan Solidaritas Antarorganisasi

Untuk mengatasi resistensi sosial tersebut, pemuda perlu membangun jaringan yang kuat dengan organisasi-organisasi lain, baik yang berbasis di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penguatan solidaritas antarorganisasi dapat memperluas ruang bagi advokasi HAM, baik dalam bentuk kolaborasi untuk menyusun petisi, mendukung kebijakan yang pro-HAM, atau mengadakan aksi bersama. Pemuda dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah, LSM, dan komunitas untuk meningkatkan visibilitas isu-isu HAM dan menunjukkan bahwa perjuangan ini adalah bagian dari gerakan global untuk keadilan dan kesetaraan. Koordinasi antarorganisasi akan membuat suara pemuda lebih keras dan lebih sulit untuk diabaikan oleh pihak yang menentang perubahan (Priatiningsih, 2023).

KESIMPULAN

Pemuda memiliki peran strategis dalam memajukan HAM di Indonesia melalui advokasi berbasis organisasi kampus, kolaborasi dengan komunitas pemuda, dan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun terdapat berbagai tantangan, pemuda dapat mengatasinya dengan edukasi, solidaritas, dan penggunaan teknologi secara efektif. Untuk itu, penting bagi pemuda untuk terus mengembangkan kapasitas mereka dalam memperjuangkan HAM demi terciptanya masyarakat yang adil dan setara.

¹⁸ Qudsyah, A. L. "Kebebasan mahasiswa dalam berpendapat dari prespektif ham," *3(3)* (2023): 3035–3049, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.366>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, N., Auliya, S., Tasya, P., Niko, S., & Muhammad, H. (2024). *Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Kalangan Remaja*. 3(2), 1433–1438.
- Ali Akrom, A. E. S. S., & Nugraha, Y. (2024). Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 253–258. <https://doi.org/10.36805/civics.v7i1.2927>
- Alvin Hamidah, N., Agus Santoso, A. P., Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, Safrida Aulia, Sherly Marlina, & Arista Putri. (2023). Penegakan HAM di Era Modernisasi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 459–463. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.406>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376–380. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1717>
- Priatiningsih, H. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang yang Unggul. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 752–769. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>
- Qudsya, A. L. (2023). *Kebebasan mahasiswa dalam berpendapat dari prespektif ham*. 3(3), 3035–3049. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.366>
- Rafidatul Aisy, D., Abdillah, Amalia, & Santoso, G. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Jiwa Kebangsaan Bagi Generasi Muda Milenial. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01(03), 164–172.
- Raja Oloan. (2023). *Pelatihan Pemahaman Hak Asasi Manusia (Ham) Bagi*. 1(4), 1561–1567.
- Rohman, A. (2022). IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG) Implementation Of Youth Participation Right In Village Government (Case Study Of Linggar Village, Rancaekek Sub-District, Bandung . *Res Nullinus*, 5(1), 22–34. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
- Trisnadiwan, R. (2024). Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>